

Cita Ekonomika

JURNAL EKONOMI

Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan di Kota Ambon

Sherly Ferdinandus
Ventje J. Kuhuparuw

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Kimia Farma *Trading* dan *Distribution* Cabang Ambon

Imelda Talahatu

Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Ramla D. Saleh

Analisis Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Dana Perimbangan di Provinsi Maluku

Hermin Oppier

Permasalahan Agency Theory Pada Perbankan Syari'ah

Trisna Sary Lewaru

Analisis Pengaruh Citra Merek Terhadap Kempuasan Merek (Studi pada Pengguna *Handphone* Blackberry di Kota Ambon)

Erlinda Tehuayo

Sistem Informasi Akuntansi Permintaan Barang Dari Gudang pada PT. Mauwasa Sejahtera Ambon

Samuel Ratumurun

Analisis Sektor Unggulan dan Pengeluaran Pemerintah di Kota Ambon

Andre Sapthu

Pengaruh Pertumbuhan Laba Bersih dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan (*Return On Equity*) pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Ambon

Senda Yunita Leatemia

Keunggulan Layanan Strategik dan Agenda Riset Mendatang

Nur Muhamad & Rainier Hendrik Sitaniapessy

Analisis Komoditi Tanaman Pangan Unggulan Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat

Maryam Sangadji

Tabungan dan Variabel Ekonomi Makro yang Mempengaruhinya di Kota Ambon

Vera Paulin Kay

Kajian Tentang Pengeluaran *Miscellaneous* pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Ambon

Sherly Rutumalessy

CE	Vol. IX	No. 1	Halaman 1 - 105	Ambon Mei 2015	ISSN 1978-3612
----	---------	-------	--------------------	-------------------	-------------------

KAJIAN TENTANG PENGELUARAN *MISCELLANEOUS* PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTA AMBON

Sherly Rutumalesy

Dosen Politeknik Negeri Ambon
Jl. Ir. M. Putuhena, Wailela – Ambon

ABSTRACT

The impact of regional autonomy and fiscal decentralization is the reform of financial management areas that include revenue and expenditure management area. Which need to be reviewed in expenditure management areas are the types of expenditure in regional government work units. In the form and structure of Ambon City Government expenditure from the year 2009 - 2012 there are three (3) expenditure that is not clear that other spending, spending that does not include other parts, and the expenses are not suspects. Third expenditure needs to be monitored because it tends to increase the odds of Local Government to the contrary.

By using analytical tools to determine the composition of miscellaneous expenditure to total expenditure specified area and also the magnitude of the standard deviation of each component of miscellaneous expenditure by comparing the maintenance expenditure.

This study is expected to provide information to the Local Government Miscellaneous Ambon on the composition of expenditure on Local Government Budgets Ambon so necessary to supervise the expenditure component areas that have a tendency to spend the rest of the budget.

Keywords: *Miscellaneous Expenditure, Local Government Budget.*

I. PENDAHULUAN

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia.

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam mengambil keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan prioritas dan potensi.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Dampak dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah reformasi manajemen keuangan daerah yang meliputi manajemen penerimaan dan manajemen pengeluaran daerah. Yang perlu ditinjau dalam manajemen pengeluaran daerah adalah jenis-jenis pengeluaran yang ada di unit kerja Pemerintah Daerah. Fenomena umum yang biasanya muncul adalah peluang terjadinya pemborosan di berbagai unit kerja akibat adanya pendekatan *incrementalism* dan *line item budget* dalam perencanaan pengeluaran.

Dalam pendekatan *incrementalism*, penentuan setiap alokasi dana untuk tiap kegiatan didasarkan pada perubahan satu atau lebih variabel yang bersifat umum. Sedangkan pendekatan *line item budget* adalah pengeluaran yang didasarkan atas “pos anggaran” yang telah ada sebelumnya. Sehingga pada akhirnya

akan berdampak pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam bentuk dan struktur pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Ambon mulai dari tahun 2009 – 2012 terdapat 3 pos pengeluaran yang tidak jelas yaitu Belanja Lain-lain, Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain dan pengeluaran tidak tersangka. Ketiga pos ini perlu diawasi karena cenderung memperbesar peluang Pemerintah Daerah untuk melakukan penyimpangan.

Riset ini mengarah kepada pemberian informasi kepada Pemerintah Daerah Kota Ambon mengenai komposisi pengeluaran *Miscellaneous* pada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kota Ambon.

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah berapa besar komposisi pengeluaran *Miscellaneous* pada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kota Ambon.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Struktur Anggaran Daerah

Struktur anggaran daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari (1) Pendapatan Daerah, (2) Belanja Daerah dan (3) Pembiayaan. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Pembiayaan adalah transaksi

keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Elemen Pengeluaran Daerah

Pengeluaran Daerah (Belanja Daerah) dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja.

- a. Belanja Daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah lainnya.
- b. Fungsi Belanja misalnya pendidikan, kesehatan dan fungsi-fungsi lainnya.
- c. Bagian Belanja misalnya belanja aparatur daerah dan belanja publik.
- d. Kelompok Belanja misalnya belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal/pembangunan.
- e. Jenis Belanja misalnya belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan

Berdasarkan struktur anggaran daerah tersebut, elemen-elemen yang termasuk dalam belanja daerah terdiri dari :

Belanja Aparatur Daerah

Bagian belanja yang berupa : Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Belanja Modal/Pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

Belanja Pelayanan Publik

Bagian belanja yang berupa : Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Belanja Modal/Pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Pengeluaran uang dengan kriteria :

- Tidak menerima secara langsung imbal balik barang dan jasa seperti yang layak terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan.
- Tidak mengharapkan dibayar kembali di masa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman.
- Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layaknya yang diharapkan pada kegiatan investasi.

Belanja Tidak Terduga

Pengeluaran yang disediakan untuk :

- Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah.

- Utang (pinjaman periode sebelumnya yang belum diselesaikan dan atau yang tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan), dan
- Pengembalian Penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan atau kelebihan penerimaan.

Elemen-elemen belanja di atas bila dijabarkan lagi terdiri dari :

Belanja Administrasi Umum

Belanja tidak langsung yang dialokasikan pada kegiatan non investasi (tidak menambah asset). Jenis belanja yang termasuk dalam kelompok ini adalah : (1) Belanja Pegawai/Personalia, (2) Belanja Barang dan Jasa, (3) Belanja Perjalanan Dinas, dan (4) Belanja Pemeliharaan.

Belanja Operasi dan Pemeliharaan

Belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan non investasi (tidak menambah asset). Jenis belanja yang termasuk dalam kelompok ini adalah : (1) Belanja Pegawai/Personalia, (2) Belanja Barang dan Jasa, (3) Belanja Perjalanan Dinas, dan (4) Belanja Pemeliharaan.

Belanja Modal dan Pemeliharaan

Belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah asset)

Elemen Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Pinjaman Obligasi, Transfer dari Dana Cadangan, Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Kebijakan Akuntansi Untuk Belanja/Biaya

Definisi Belanja/Biaya

: Belanja / biaya adalah penurunan aktiva atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam suatu periode akuntansi atau periode anggaran tertentu. Belanja / biaya diklasifikasikan menurut penggunaan belanja/biaya dan pusat pertanggungjawaban. Penggunaan belanja / biaya dirinci berdasarkan kelompok dan jenis belanja/biaya, sedangkan pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Daerah.

Pengakuan dan Pengukuran Biaya

Belanja/biaya diakui dalam laporan keuangan kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan apabila pengukurannya dapat diuji serta bebas dari bias. Dengan demikian, pengakuan belanja/biaya terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva (misalnya, akrual hak pegawai dan penyusutan aktiva tetap).

Seluruh belanja/biaya kecuali biaya penyusutan, amortisasi, penyisihan diakui pada saat terjadinya sebesar kas yang dikeluarkan atau sebesar harga barang atau jasa yang dikonsumsi. Sedangkan biaya penyusutan, amortisasi dan penyisihan diakui secara periodic sebesar perhitungan alokasi harga perolehan atau penurunan manfaat ekonomi atau perhitungan kemungkinan tidak tertagihnya piutang pada periode berjalan.

Kebijakan Akuntansi Untuk Pembiayaan

Definisi Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja dalam satu periode akuntansi.

Sumber-sumber pembiayaan terdiri dari sumber yang berupa penerimaan dan pengeluaran daerah. Sumber Penerimaan Daerah, antara lain : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Pinjaman Obligasi, Transfer dari Dana Cadangan, Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan.

Sumber Pengeluaran Daerah antara lain : Pembayaran Utang Pokok dan Penyertaan Modal (investasi). Pusat Pertanggungjawaban adalah bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Daerah.

Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan diakui selama periode berjalan dan akhir periode akuntansi. Dalam periode berjalan, pembiayaan diakui pada saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah atau pada saat kas dikeluarkan untuk sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran kas.

Pada akhir periode, pembiayaan diakui berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja/biaya yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan

III. METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ambon.

Identifikasi dan Pengukuran Variabel

Variabel Bebas (X), variable bebas dalam penelitian ini adalah Pengeluaran *Miscellaneous*. Pengeluaran *Miscellaneous* meliputi Belanja Lain-lain, Pengeluaran yang tidak termasuk dalam bagian lain dan pengeluaran yang tidak tersangka.

Variabel Terikat (Y), variable terikat dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah (Y). Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Teknik Analisis Data

- Mengidentifikasi pengeluaran-pengeluaran *Miscellaneous* pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 2009 – 2012.
- Menghitung besarnya pengeluaran *Miscellaneous*.
- Membuat perbandingan dengan besarnya Pengeluaran Daerah Kota Ambon.
- Menghitung simpangan baku.

Untuk menentukan besarnya komposisi pengeluaran *Miscellaneous* terhadap Pengeluaran Daerah Kota Ambon, dengan menggunakan rumus :

$$a = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Dimana :

- a = Prosentase Pengeluaran *Miscellaneous* terhadap Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Ambon
 A = Jumlah Pengeluaran *Miscellaneous*
 B = Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Ambon

Sedangkan untuk menghitung simpangan baku, menggunakan rumus :

$$\delta = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2}$$

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi total belanja Pemerintah Daerah Kota Ambon pada berbagai komponennya seperti terlihat pada tabel 1 dan tabel 2, Dari data pada tabel 1 dan tabel 2, jika “biaya pemeliharaan” dibandingkan dengan “pengeluaran lain-lain”, “pengeluaran yang tidak termasuk dalam bagian lain” dan “pengeluaran tidak terduga” maka hasilnya dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 1. Komposisi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Ambon
Tahun 2009 – 2010

Jenis Pengeluaran	2009	2010	Rerata
Belanja Pegawai	75.23	69.93	72.58
Belanja Barang	11.24	13.72	12.48
Biaya Pemeliharaan	1.31	2.07	1.69
Biaya Perjalanan Dinas	0.34	0.40	0.37
Belanja Lain – lain	0.00	2.55	1.27
Angsuran Hutang dan Bunga	0.00	0.00	0.00
Pengeluaran Tidak Termasuk Bagian Lain	0.00	0.40	0.20
Pengeluaran Tidak Tersangka	0.42	0.53	0.47
Pengeluaran Pembangunan	11.47	10.41	10.94
Pengeluaran <i>Miscellaneous</i>	0.42	3.48	1.95

Sumber : Data Diolah, 2015

Tabel 2. Komposisi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Ambon
Tahun 2011 – 2012

Jenis Pengeluaran	2011	2012	Rerata
Belanja Aparatur	32.60	29.12	30.86
Belanja Publik	64.94	58.23	61.58
Belanja Bagi Hasil Bantuan Keuangan	1.45	2.56	2.05
Belanja Tidak Tersangka	1.35	0.67	1.01
Pengeluaran Daerah	0.11	9.41	4.76
Pengeluaran <i>Miscellaneous</i>	1.35	0.67	1.01

Sumber : Data Diolah, 2015

Tabel 3. Perbandingan Biaya Pemeliharaan dengan Komponen Pengeluaran *Miscellaneous*
Pemerintah Daerah Kota Ambon

No	Komponen Pengeluaran	Simpangan Baku (δ)
1	Belanja Pemeliharaan	9.23 %
2	Belanja Lain-lain	146.67 %
3	Belanja Tidak Termasuk Bagian Lain	3.00 %
4	Belanja Tidak Tersangka	37.79 %

Sumber : Data Diolah, 2015

Struktur Anggaran Daerah yang digunakan telah mengalami perubahan dengan pendekatan kinerja pemerintah. Dimana ada 2 (dua) komponen dari pengeluaran *Miscellaneous* yang tidak termasuk dalam bagian lain dan belanja lain-lain.

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2, proporsi biaya pemeliharaan secara rata-rata dari tahun 2009-2010 lebih besar jika dibandingkan dengan ketiga jenis pengeluaran *Miscellaneous* lainnya. Sedangkan untuk tahun 2011-2012, Belanja Pemeliharaan menjadi bagian dari kedua jenis belanja, yaitu belanja aparatur dan belanja publik.

Selanjutnya jika dilihat dari simpangan bakunya (*standar deviation*), menunjukkan bahwa simpangan baku untuk biaya pemeliharaan lebih kecil daripada simpangan baku untuk belanja lain-lain (9.23% dibanding 146.67%), dan pengeluaran tidak tersangka

(9.23% dibanding 37.79%), namun lebih besar daripada pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain (9.23% dibanding 3.00%).

Perbedaan simpangan baku ini menunjukkan bahwa proporsi belanja lain-lain dan belanja tidak tersangka cenderung tinggi tetapi relatif tidak stabil. Untuk belanja lain-lain, ketidakstabilan ini disebabkan oleh penghilangan komponen belanja ini dalam struktur anggaran daerah. Dengan demikian, pengeluaran tidak tersangka ini cenderung menjadi sarana untuk menghabiskan sisa anggaran.

V. PENUTUP

a) Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa komposisi pengeluaran *Miscellaneous* rata-rata 1.48% dari total belanja dan

pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Ambon selama tahun 2009-2012 dengan perubahan struktur anggaran dimana 2 (dua) komponen pengeluaran *Miscellaneous* dihilangkan, yaitu Belanja lain-lain dan Belanja yang tidak termasuk bagian lain

b) Saran

Adapun saran yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Kota Ambon adalah Perencanaan untuk biaya tidak tersangka pada Anggaran Belanja Daerah Kota Ambon hendaknya dilakukan dengan teliti karena pos pengeluaran *Miscellaneous* ini cenderung menjadi sarana untuk menghabiskan sisa anggaran.

REFERENSI

Bastian, Indra dan Gatot Soepriyanto. (2002). Sistem Akuntansi Sektor Publik : Konsep Untuk Pemerintah Daerah. Penerbit Salemba Empat; Jakarta.

-----, (2002). Sistem Akuntansi Sektor Publik : Modul Untuk Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan. Penerbit Salemba Empat; Jakarta.

Gade, Muhammad. (2000). Akuntansi Pemerintahan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; Jakarta.

Mardiasmo. (2002.) Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi; Yogyakarta

Soeratno dan Lincoln Arsyad. (2003). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis.* UPP AMP YKPN; Yogyakarta

Supranto, J. (2001). *Statistik Teori dan Aplikasi.* Jilid 2. Penerbit Erlangga; Jakarta

Widodo, Hg. Suseno Triyanto. (1991). Indikator Ekonomi. Penerbit Kanisius; Yogyakarta.